

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN  
2015 TENTANG PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK -  
HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**



*Oleh :*

**AMINAH  
1410831011**

**Dosen Pembimbing :**

- 1. Dr. Indah Adi Putri M.IP**
- 2. Dewi Anggraini, S.IP, M.Si**

**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2021**

## ABSTRAK

**AMINAH, 1410831011, Jurusan Ilmu Politik, FISIP - UNAND Padang. Dengan Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang. Sebagai Pembimbing I Dr. Indah Adi Putri M.IP dan Pembimbing II Dewi Anggraini, S.IP, M.Si. Skripsi ini terdiri dari 11 referensi buku, 3 skripsi, 4 jurnal, 17 sumber elektronik, dan 9 perundang - undangan.**

Pemerintah memiliki peran yang penting dalam memenuhi hak - hak penyandang disabilitas termasuk dalam hak penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana. Dengan adanya Undang - Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas membuktikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan, dan hak yang sama dengan masyarakat non disabilitas lainnya. Berangkat dari hal tersebut peneliti ingin menjelaskan proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang Dengan interaksi antar implementor yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Teori yang digunakan adalah teori implementasi Donald Van Meter & Carl E. Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe dekriptif. Hasil dari penelitian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang ini menunjukkan bahwa SOP yang terlaksana belum berjalan secara maksimal, Sumber dana yang belum mencukupi, sosialisasi yang dilakukan belum berjalan secara maksimal, Implementor belum memahami pedoman dalam perencanaan teknis aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik belum mendukung implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan sasaran kebijakan, karakteristik agen pelaksana dan disposisi implementor telah mendukung kebijakan Perda No 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang.

*Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas*

## ABSTRACT

**AMINAH, 1410831011, Department of Political Science, FISIP - UNAND Padang. With a Thesis Title: Implementation of Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Fulfillment and Protection of Rights of Persons with Disabilities in the City of Padang. As Advisor I Dr. Indah Adi Putri M.IP and Supervisor II Dewi Anggraini, S.IP, M.Si. This thesis consists of 11 book references, 3 theses, 4 journals, 17 electronic sources, and 9 legislation.**

The government has an important role in fulfilling the rights of persons with disabilities, including the right to provide accessibility to facilities and infrastructure. With the existence of Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, it proves that persons with disabilities have the same position and rights as other non-disabled people. Departing from this, the researcher wants to explain the implementation process of Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning the Fulfillment and Protection of the Rights of Persons with Disabilities in the City of Padang with the interaction between implementers involved in the policy. The theory used is the theory of implementation of Donald Van Meter & Carl E. Van Horn. This study uses a qualitative approach with descriptive type. The results of the research on Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning the Fulfillment and Protection of the Rights of Persons with Disabilities in the City of Padang indicate that the SOPs have not been implemented optimally, the sources of funds are insufficient, the socialization has not been carried out optimally, the implementers do not understand the guidelines. In technical planning, the accessibility of facilities and infrastructure for persons with disabilities, social, economic and political conditions have not supported the implementation of the policy. Meanwhile, the policy targets, the characteristics of the implementing agency and the disposition of the implementers have supported the policy of Perda No.3 of 2015 concerning the Fulfillment and Protection of the Rights of Persons with Disabilities in Padang City.

*Keywords: Implementation, Regional Regulations, Accessibility, Persons with Disabilities*